



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SATUAN KERJA :Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan
Pembangunan Kewilayahan
PEKERJAAN : Lisensi Office 365

**SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KERANGKA ACUAN KERJA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

Kementerian Negara / Lembaga	:	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Unit Eselon II	:	Biro Umum dan Keuangan
Program	:	Program Dukungan Manajemen
Sasaran Program	:	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Indikator Kinerja Program	:	Persentase Pelaksanaan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Kegiatan	:	Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Klasifikasi Rincian Output (KRO)	:	Layanan Dukungan Manajemen Internal
Indikator KRO	:	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal yang dihasilkan
Rincian Output (RO)	:	Layanan Umum
Indikator RO	:	Jumlah Layanan Umum yang dihasilkan

I. LATAR BELAKANG

Pekerjaan Penyediaan Lisensi Office 365 dimaksudkan untuk mendukung kinerja dan produktivitas pimpinan dan seluruh pegawai lingkup Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Perangkat lunak office ini menjadi solusi operasional berbasis cloud yang menyediakan dukungan komprehensif terhadap produktivitas perkantoran, yang mencakup layanan Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, dan SharePoint. Penerapan sistem ini dinilai menjadi sebuah kebutuhan mendesak yang akan mendukung modernisasi birokrasi, peningkatan efisiensi kerja, serta jaminan keamanan informasi di lingkungan kementerian.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Penyediaan Lisensi Office 365 dilaksanakan sebagai upaya penyediaan infrastruktur perangkat lunak yang andal dan aman bagi operasional pemerintahan. Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini, antara lain:

1. Maksud

Melaksanakan penyediaan lisensi Office 365 yang diperuntukkan bagi pimpinan dan seluruh pegawai di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk mendukung kelancaran administrasi dan operasional pekerjaan sehari-hari.

2. Tujuan

- a. Tercapainya ketersediaan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau sistem informasi yang andal dalam rangka mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
- b. Terpenuhinya 3 (tiga) aspek penting keamanan informasi secara menyeluruh, yaitu Confidentiality (Kerahasiaan), Integrity (Integritas), dan Availability (Ketersediaan) guna mewujudkan sistem SPBE yang lebih baik, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.

III. SASARAN

Sebagai arah dan tolak ukur pelaksanaan kegiatan, penyediaan lisensi Office 365 dirancang untuk mencapai sasaran peningkatan mutu layanan operasional melalui:

1. Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas Pegawai

Penggunaan sistem cloud OneDrive akan mempermudah pengelolaan data dan dokumen, serta memungkinkan kolaborasi atau penyuntingan dokumen secara real-time yang dapat meminimalisir ketergantungan pada sistem manual yang lambat dan kurang efisien.

2. Peningkatan Kualitas Kolaborasi dan Komunikasi

Tersedianya platform Microsoft Teams memfasilitasi komunikasi internal yang efektif via obrolan, panggilan video, dan konferensi daring. SharePoint disediakan untuk kemudahan berbagi dokumen antarunit kerja, sementara Outlook memastikan manajemen email resmi berjalan profesional dan terorganisir.

3. Peningkatan Keamanan Data dan Kepatuhan Regulasi

Keamanan informasi pemerintahan dijaga melalui sistem enkripsi tingkat tinggi, perlindungan ancaman siber, dan manajemen akses berbasis peran. Sasaran ini juga mencakup kepatuhan terhadap standar regulasi keamanan (seperti ISO 27001) serta penyediaan fitur pemulihan dan pencadangan untuk mencegah kehilangan data instansi.

4. Fleksibilitas dan Mobilitas Sistem Kerja

Dukungan akses dari berbagai multi-perangkat (PC, laptop, tablet, dan smartphone) memungkinkan pegawai melaksanakan sistem kerja hibrida dengan akses penyimpanan terpusat, sehingga produktivitas tetap optimal tanpa dibatasi lokasi fisik.

5. Efisiensi Biaya dan Pemeliharaan IT

Model berlangganan memastikan penggunaan anggaran lebih hemat dibandingkan lisensi konvensional. Pemeliharaan infrastruktur dan pembaruan perangkat lunak dikelola langsung oleh Microsoft, yang secara signifikan mengurangi beban tim IT internal dan menekan kebutuhan pengadaan server lokal.

III. DASAR HUKUM

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Lisensi Office 365 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan keuangan negara, serta pengadaan barang/jasa pemerintah. Dasar hukum ini menjadi rujukan agar kegiatan dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan dari sisi teknis, administrasi, maupun keuangan. Adapun dasar hukum yang digunakan, yakni:

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Menjadi pedoman pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan pekerjaan konstruksi oleh pemerintah, agar proses pemilihan penyedia dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel.

IV. URAIAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan Penyediaan Lisensi Office 365 merupakan rangkaian penyediaan perangkat lunak cloud beserta dukungan teknisnya untuk 405 pengguna lisensi office dasar dan 60 pengguna lisensi kolaborasi dengan masa aktif selama 1 (satu) tahun. Adapun ruang lingkup kegiatan dan spesifikasi teknis yang akan dilaksanakan mencakup:

A. Pekerjaan Penyediaan Lisensi

1. Penyediaan Lisensi Office 365 Tipe 1 (Enterprise 3 / E3 non-teams)

Pekerjaan meliputi penyediaan lisensi Enterprise 3 sejumlah 155 user yang dapat diakses melalui aplikasi berbasis desktop, web browser, dan smartphone dengan batas penggunaan maksimal 5 komputer/laptop dan 5 smartphone per user. Lisensi ini mencakup penyediaan kapasitas penyimpanan personal (cloud) hingga 5 TB yang mendukung penambahan, serta mailbox email hingga 100 GB dan archive email hingga 1,5 TB. Pekerjaan juga mencakup pemastian fitur aplikasi email desktop, kalender, program pembuat diagram/skema jaringan berbasis web, perlindungan ancaman cyber melalui pemfilteran cloud anti-spam/malware, penyimpanan tingkat organisasi, platform pengembangan aplikasi, hingga fitur keamanan tingkat lanjut Data Loss Prevention untuk email dan file.

2. Penyediaan Lisensi Microsoft 365 Tipe 2 (Business Standard)

Pekerjaan meliputi penyediaan lisensi Business Standard sejumlah 160 user untuk penggunaan aplikasi produktivitas berbasis desktop, web, dan smartphone (hingga 5 komputer/laptop dan 5 smartphone). Kapasitas yang disediakan meliputi penyimpanan personal cloud hingga 1 TB (mendukung penambahan) dan mailbox email hingga 50 GB. Fitur yang terpasang meliputi aplikasi kolaborasi tim untuk

rapat dan presentasi lengkap dengan pesan singkat dan perekaman, aplikasi pembuat diagram berbasis web, email desktop, kalender, perlindungan keamanan cloud, platform pengembang aplikasi, dan penyimpanan organisasi.

3. Penyediaan Lisensi Microsoft 365 Tipe 3 (Business Basic)

Pekerjaan meliputi penyediaan lisensi Business Basic sejumlah 90 user yang dioptimalkan penggunaannya secara eksklusif untuk aplikasi berbasis web (browser) dan smartphone (hingga 5 perangkat PC/laptop dan 5 smartphone). Lisensi ini memberikan penyimpanan personal cloud hingga 1 TB dan mailbox email hingga 50 GB. Lingkup layanannya mencakup aplikasi pembuat diagram berbasis web, fitur kolaborasi tim dengan rapat dan pesan singkat beserta fungsi perekaman, kalender, fitur perlindungan cloud dari ancaman email, penyimpanan organisasi, serta platform pengembangan aplikasi.

4. Penyediaan Lisensi Tipe 4 (Microsoft Teams Enterprise)

Pekerjaan meliputi penyediaan platform kolaborasi spesifik berupa lisensi Teams Enterprise sejumlah 60 user. Platform ini memfasilitasi kebutuhan panggilan suara dan video, pelaksanaan personal meeting tanpa batas waktu, serta group meeting dengan durasi maksimal 30 jam. Kapasitas layanan mampu menampung hingga 1.000 partisipan untuk meeting reguler dan hingga 10.000 partisipan khusus penyelenggaraan Live Event atau Webinar. Fitur tambahan yang disediakan meliputi breakout room, fitur otomatisasi transcription dan translation, serta kemampuan kustomisasi untuk membuat avatar di dalam meeting.

B. Pekerjaan Konfigurasi dan Dukungan Teknis

1. Konfigurasi Akun Pengguna

Melaksanakan pekerjaan penyiapan dan konfigurasi sistem pada lingkungan cloud kementerian, yang secara khusus mencakup proses registrasi dan pembuatan akun-akun pengguna baru (create new user) sesuai dengan alokasi lisensi.

2. Dukungan Teknis dan Garansi Berjalan

Penyedia jasa wajib memberikan komitmen layanan dukungan teknis berkelanjutan serta memberikan garansi operasional sistem secara penuh selama masa aktif 12 bulan.

C. Pekerjaan Alih Pengetahuan

1. Alih Pengetahuan (Knowledge Transfer)

Apabila dibutuhkan, Penyedia Jasa berkewajiban menyelenggarakan forum pertemuan atau bimbingan teknis bersama personel satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memastikan transfer kemampuan pengelolaan dan administrasi fitur Office 365 berjalan dengan baik.

V. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Pengadaan penyediaan Lisensi Office 365 akan dilaksanakan di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

VI. KUALIFIKASI PENYEDIA JASA

Penyedia barang/jasa yang akan melaksanakan kegiatan Penyediaan Lisensi Office 365 harus memenuhi persyaratan teknis, administratif, dan legal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kualifikasi ini diperlukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh pihak yang kompeten, merupakan mitra resmi prinsipal, dan memiliki komitmen terhadap prinsip akuntabilitas pengadaan perangkat lunak

yang selaras dengan standar Indeks Tata Kelola Pengadaan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah 2026.

Adapun kualifikasi minimal yang harus dipenuhi oleh penyedia adalah sebagai berikut:

1. Kualifikasi Administrasi

- a. Berbadan usaha resmi dan memiliki **Nomor Induk Berusaha (NIB)**.
- b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan.
- c. Terdaftar pada platform pengadaan pemerintah secara elektronik (LPSE/Katalog Elektronik) serta memiliki legalitas usaha yang masih berlaku.
- d. Tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan tidak masuk dalam Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Kualifikasi Teknis

- a. Merupakan mitra resmi (Authorized Partner / Reseller) dari Microsoft, yang dibuktikan dengan Surat Dukungan Resmi (Letter of Authorization / Partnership Certificate) yang masih berlaku dari prinsipal atau distributor tingkat pertama.
- b. Memiliki pengalaman dalam pekerjaan penyediaan perangkat lunak (software) atau sistem informasi berbasis cloud untuk instansi pemerintah atau swasta.
- c. Memiliki atau menyediakan tenaga teknis (Technical Support) yang kompeten untuk melaksanakan proses konfigurasi awal (pembuatan akun user baru) dan siap memberikan dukungan teknis (troubleshooting) yang responsif selama masa garansi 12 bulan.
- d. Menjamin sepenuhnya legalitas dan keaslian (originalitas) lisensi yang diberikan, serta memastikan seluruh fitur yang diaktifkan (Enterprise 3, Business Standard, Business Basic, dan Teams Enterprise) berfungsi sesuai spesifikasi teknis yang dipersyaratkan.

VII. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan Penyediaan Lisensi Office 365 disusun secara sistematis dan terencana untuk memastikan seluruh pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien dengan alokasi waktu pelaksanaan selama 2 (dua) bulan. Rangkaian pelaksanaan kegiatan ini merangkum proses yang saling berkesinambungan, yang diawali dengan tahap persiapan untuk memastikan kesiapan administratif serta kelancaran koordinasi teknis awal. Setelah itu, pekerjaan dilanjutkan pada tahap pelaksanaan yang berfokus pada penyediaan deployment lisensi secara penuh serta konfigurasi sistem untuk pembuatan akun pengguna (create new user) sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Seluruh rangkaian pekerjaan kemudian diakhiri dengan tahap pelaporan akhir, di mana penyedia diwajibkan menyusun laporan komprehensif yang memuat dokumentasi kelancaran operasional lisensi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Selama pelaksanaan ketiga tahapan teknis tersebut, penyedia jasa diwajibkan untuk selalu berkoordinasi dengan pengelola atau tim teknis internal Pejabat Pembuat Komitmen guna memastikan tidak ada kendala hambatan penerapan SPBE dan proses alih pengetahuan dapat berjalan dengan optimal.

VIII. PERSETUJUAN LISENSI DAN DOKUMENTASI

Untuk menjamin kualitas, keaslian (originality), dan kepatuhan penyediaan lisensi Microsoft 365 sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak, seluruh lisensi yang diserahkan harus merupakan lisensi resmi (authorized) dan dapat diverifikasi secara

langsung melalui portal resmi Microsoft (Microsoft 365 Admin Center). Penyedia jasa wajib memastikan bahwa seluruh tahapan pengadaan, aktivasi, dan konfigurasi terdokumentasikan dengan baik. Setiap tahapan penyerahan hasil pekerjaan wajib dikonfirmasi dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Tim Teknis sebelum seluruh sistem dinyatakan siap digunakan secara penuh. Adapun yang termasuk ke dalam persetujuan material dan dokumentasi adalah:

1. Menyusun dan Menyerahkan Dokumentasi Teknis Awal:
 - a. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (Schedule of Deployment): Rencana kerja terperinci yang memuat tahapan waktu penyediaan lisensi, jadwal registrasi/konfigurasi tenant, serta alokasi waktu pelaksanaan alih pengetahuan (knowledge transfer).
 - b. Dokumen Keabsahan Lisensi (Letter of Authorization / Partnership Certificate): Surat dukungan atau bukti kualifikasi kemitraan resmi dari Prinsipal/Distributor Microsoft yang membuktikan bahwa penyedia berwenang menyalurkan lisensi perangkat lunak resmi.
 - c. Draft Pemetaan Akun Pengguna (User Account Mapping Plan): Rencana alokasi dan penamaan akun pengguna (user ID/domain email) yang merinci penyebaran 405 lisensi Office 365 (155 Enterprise 3, 160 Business Standard, 90 Business Basic) dan 60 lisensi Microsoft Teams Enterprise sesuai dengan unit kerja di lingkungan kementerian.
2. Menyampaikan Bukti Hasil Konfigurasi dan Aktivasi Sistem:
 - a. Bukti Aktivasi Lisensi (License Entitlement & Tenant Status): Tangkapan layar (screenshot) atau laporan ekspor dari Microsoft 365 Admin Center yang menampilkan total volume lisensi terdaftar beserta tanggal mulai dan berakhirnya masa aktif berlangganan selama 12 bulan.
 - b. Laporan Konfigurasi Pengguna (User Creation Log): Laporan bukti pelaksanaan pekerjaan pembuatan akun pengguna baru (create new user) dan pengaturannya di portal cloud yang menyatakan akun telah aktif dan siap digunakan oleh masing-masing pegawai.
3. Menyusun dan Menyerahkan Dokumentasi Akhir Pekerjaan:
 - a. Sertifikat Lisensi Resmi (Official License Certificate): Dokumen sertifikasi atau kepemilikan lisensi resmi yang diterbitkan oleh Microsoft atas nama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
 - b. Panduan Operasional dan Dokumentasi Alih Pengetahuan (User & Admin Guide): Buku petunjuk ringkas akses user serta panduan pengelolaan administrasi sistem (admin guide) sebagai materi pendukung pelaksanaan knowledge transfer kepada pengelola TIK kementerian.
 - c. Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan: Laporan komprehensif yang memuat ringkasan pelaksanaan kegiatan penyediaan lisensi, dokumentasi tangkapan layar aktivasi, serta bukti penyelesaian pekerjaan. Laporan ini diserahkan dalam bentuk 1 (satu) eksemplar buku laporan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum periode kegiatan berakhir, dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).

IX. SUMBER DANA

Kegiatan Pengadaan Lisensi Office 365 ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025. Dana tersebut dialokasikan dalam DIPA Satuan Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sesuai ketentuan yang berlaku.

X. OUTPUT KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Lisensi Office 365 diharapkan menghasilkan keluaran akhir yang mencakup:

A. Output Fisik

Aktivasi infrastruktur cloud berupa ketersediaan seluruh unit lisensi perangkat lunak yang terdiri atas lisensi Office 365 (405 pengguna) dan lisensi Teams (60 pengguna) yang dikonfigurasi dengan baik dan bergaransi selama 1 (satu) tahun.

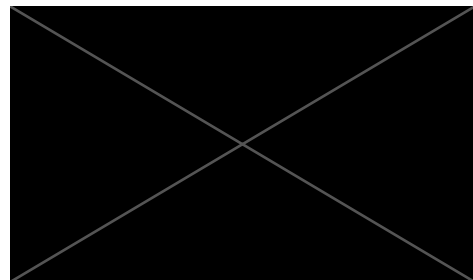
B. Output Non-Fisik

Tersusunnya 1 (satu) buku Laporan Akhir yang mencakup rincian pelaksanaan kegiatan penyediaan serta kelengkapan dokumentasinya. Dokumen ini wajib diserahkan kepada PPK selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum periode kegiatan secara keseluruhan dinyatakan berakhir.

XI. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai pedoman utama tata laksana pengadaan dan penyediaan lisensi perangkat lunak di Kementerian. Dokumen ini diharapkan mampu menjadi panduan komprehensif terkait rincian spesifikasi teknis, jumlah volume, serta parameter hasil yang dituju, sehingga menjamin kualitas hasil penyediaan yang akuntabel, fungsional, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar teknologi mutakhir yang diharapkan.

Kepala Biro Umum dan Keuangan



Antonius Lambok Sihombing
NIP.